



**Palang
Merah
Indonesia**



**RENCANA PROGRAM KERJA
PMI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

RENCANA PROGRAM KERJA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. *PENDAHULUAN*

Rencana Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) PMI Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ini, merupakan penjabaran dari Rencana Program Pokok Pelaksanaan Tugas PMI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 hasil Musyawarah XII PMI Provinsi Jawa Tengah. Sesuai hasil Munsyawarah Nasional PMI XXII Tahun 2024, Visi PMI adalah **Terwujudnya Palang Merah Indonesia (PMI) Yang Profesional, Bersinergi, Dan Berkelanjutan.**

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Program Kerja dan APB PMI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diajukan dalam Mukerprov untuk dibahas dan disepakati. Program Kerja Tahun 2025 sebagian besar merupakan Program Kerja yang setiap Tahun Anggaran wajib dilaksanakan sebagai Penjabaran dari Rencana Program Pokok Pelaksanaan Tugas PMI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2026. Sedangkan beberapa Program Kerja Khusus yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 ini, antara lain Pengembangan Kapasitas, Penanggulangan Bencana, Penyebarluasan Kepalangmerahan, Upaya Kesehatan Donor Darah, Pelayanan Kesehatan & Sosial, Pembinaan Generasi Muda, Penghargaan dan Temu Donor Darah Sukarela ke 50 & 75 kali dengan Gubernur Jateng, menghadapkan DDS 100 kali ke Presiden dan Kegiatan Rapat Kerja serta Rapat Koordinasi juga akan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kinerja PMI.

B. *Sistematika penyusunan sbb :*

I. Pendahuluan

II. Uraian Rencana Operasional

Rencana Startegis PMI Tahun 2024 - 2029 Hasil Musyawarah Nasional PMI XXII Tahun 2024 :

TUJUAN STRATEGIS 1

Memperkuat peran PMI dalam sinergitas tata kelola pelayanan donor darah untuk memastikan kecukupan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas.

TUJUAN STRATEGIS 2

Memperkuat kesiapan layanan PMI dengan meningkatkan sebaran pelayanan melalui pemberdayaan lokal untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana, tangguh iklim, dan tangguh krisis Kesehatan.

TUJUAN STRATEGIS 3

Membangun kesiapan organisasi untuk memastikan layanan PMI bagi korban konflik tersedia dan mudah diakses.

TUJUAN STRATEGIS 4

Membangun kapabilitas sumber daya manusia yang unggul melalui pembinaan dan sertifikasi terstruktur beradaptasi dengan perubahan.

TUJUAN STRATEGIS 5

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi untuk layanan PMI yang berkelanjutan.

TUJUAN STRATEGIS 6

Meningkatkan peran aktif organisasi dalam diplomasi kemanusiaan sebagai strategi kerjasama dan koordinasi di tingkat nasional dan global untuk mempromosikan perdamaian dunia.

TUJUAN STRATEGIS 7

Meningkatkan peran aktif organisasi dalam mewujudkan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan diversifikasi sumber daya, memberikan layanan kemanusiaan yang inovatif dan adaptif.

III. Penutup

IV. Lampiran-Lampiran :

- A. Timeline Program Kerja PMI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 meliputi :
 - 1. Unit Markas
 - 2. Unit Donor Darah

C. PENUTUP

Demikian Rencana Program Kerja PMI Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Harapannya dapat disempurnakan serta ditetapkan dalam Mukerprov tahun 2025 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman bagi jajaran PMI Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh PMI Kabupaten/Kota dalam menentukan dan melaksanakan Program Kerja. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, Amin.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,



Sarwa Pramana, SH., M.Si.

TUJUAN STRATEGIS-1

Memperkuat peran PMI dalam sinergitas tata kelola pelayanan donor darah untuk memastikan kecukupan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN KUNCI	BIAYA
Outcome (Hasil Jangka Menengah) 1.1 Ketersediaan darah yang aman, berkualitas dan terjangkau melalui tata kelola layanan donor darah yang bersinergi				
1.1.1	Sistem yang efektif untuk merekrut, mempertahankan dan memotivasi donor darah sukarela diimplementasikan di UDD semua tingkatan;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota PMI Provinsi	1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan edukasi tentang donor darah, serta bekerjasama dengan media untuk mengubah persepsi negatif tentang donor darah, memahami proses dan alur donor darah, serta menyoroti manfaat donor darah bagi masyarakat; 2. Penguatan sistem manajemen kualitas melalui standarisasi prosedur, pelatihan teknis, pelatihan manajemen kualitas dan pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, melakukan audit internal berkala dan menetapkan indikator kinerja kunci (KPI/Key Performance Indicator); 3. Peningkatan kualitas darah melalui screening donor yang ketat,	51-133-0001, 51-133-0004, 51-133-0005
1.1.2	Proses seleksi dan pengambilan darah diterapkan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar nasional untuk menjamin darah yang aman dan berkualitas;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota PMI Provinsi		51-133-0001, 51-133-0004, 51-133-0005
1.1.3	Optimalisasi sistem distribusi darah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memenuhi permintaan darah dari fasilitas kesehatan;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota PMI Provinsi		52-333-0005, 52-333-0006

1.1.4	Sistem manajemen persediaan terpadu untuk reagen dan kantong darah diimplementasikan di UDD semua tingkatan.	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota	<p>pengujian darah yang komprehensif dan pengolahan darah yang modern;</p> <p>4. Peningkatan ketersediaan darah melalui kegiatan donor darah sukarela, membangun jejaring donor dan mengelola persediaan darah secara efektif;</p> <p>5. Penguatan kemitraan melalui kolaborasi dengan pemerintah, kerjasama dengan Rumah Sakit (RS) dan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>6. Implementasi standar nasional melalui pemetaan dan sosialisasi, serta penyusunan dokumen yang terkait prosedur kerja;</p> <p>7. Melakukan survei kepuasan donor secara berkala dan evaluasi program yang dilaksanakn untuk melakukan perbaikan dan penguatan layanan;</p> <p>8. Pengembangan sistem digitalisasi untuk mempermudah masyarakat mencari lokasi donor darah terdekat, mendaftar dan mendapatkan informasi terkait donor darah. Selain itu, memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan membuat janji donor darah secara daring;</p> <p>9. Perluasan jaringan dan optimalisasi UDD yang berorientasi pada pendekatan pelayanan di daerah padat penduduk dengan partisipatif dan inovatif;</p>	52-333-0005, 52-333-0006
1.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah) : Sistem manajemen kualitas di UDD PMI menguat dengan berpedoman pada standar nasional				
1.2.1	Pegawai UDD PMI memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan didukung oleh pelatihan berkelanjutan, serta infastruktur yang memadai;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		52-313-0001, 52-263-0001
1.2.2	Pengawasan dan evaluasi terhadap aspek pelayanan darah dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR) yang terintegrasi dan survei kepuasan masyarakat;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		52-313-0005, 52-313-0006
1.2.3	Sistem manajemen mutu UDD PMI yang berorientasi pada kinerja diimplementasikan secara efektif di semua tingkatan, didukung oleh manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		51-133-0005, 52-333-0005, 52-333-0006
1.2.4	Penggunaan peralatan dan bahan habis pakai sesuai standar nasional dan rekomendasi UDD Pusat PMI diterapkan secara konsisten;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		51-133-0002, 51-133-0005, 52-333-0005, 52-333-0006
1.2.5	Penelitian dan pengembangan layanan darah dilaksanakan secara berkelanjutan.	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		51-133-0002, 51-133-0005, 52-333-0005, 52-333-0006

1.3. Outcome (Hasil Jangka Menengah) : Aksesibilitas masyarakat terhadap layanan donor darah meningkat dengan fasilitas yang mudah dijangkau			10. Implementasi program penghargaan bagi pendonor aktif oleh PMI di setiap tingkatan.	
1.3.1	Sistim pendaftaran donor darah digital dioptimalkan untuk mempermudah pendaftaran dan penjadwalan donor;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		52-323-0001, 52-333-0005, 52-333-0006
1.3.2	Mobil donor darah keliling dioperasikan untuk memperluas akses layanan donor darah;	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		52-323-0005, 52-333-0002
1.3.3	Mekansime komunikasi, koordinasi dan pembinaan internal serta antar tingkatan UDD PMI dioptimalkan melalui sistim konsolidasi dan regionalisasi untuk memastikan pelayanan donor darah lebih efisien dan terstandar, termasuk keterlibatan aktif pemangku kepentingan eksternal	UDD PMI Provinsi dan 35 UDD PMI Kab/Kota		52-323-0001, 52-323-0007

TUJUAN STRATEGIS-2

Memperkuat kesiapan layanan PMI dengan meningkatkan sebaran pelayanan melalui pemberdayaan lokal untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana, tangguh iklim, dan tangguh krisis kesehatan

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN KUNCI	BIAYA
2.1. Outcome (Hasil Jangka Menengah) : Pengelolaan pelayanan PMI yang optimal sesuai pedoman standar pelayanan minimal			1. Pemetaan potensi risiko, aksi mitigasi atau adaptasi, kesiapan respon dan stakeholder di wilayah kerja PMI; 2. Pemetaan wilayah prioritas yang membutuhkan intervensi layanan kepalangmerahan; 3. Pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat; 4. Pengembangan sistem informasi layanan kepalangmerahan PMI, seperti penguatan sistem manajemen informasi kedaruratan, memperkuat dan memperluas pemanfaatan sistem satuSBM (Surveilans Berbasis Masyarakat); 5. Peningkatan kesiapan institusi untuk tangguh bencana, tangguh krisis kesehatan dan tangguh iklim melalui pemukhtahiran panduan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasana dan logistik kesehatan, serta pengembangan perangkat kerja;	
2.1.1	Pedoman teknis pelayanan dasar diterbitkan, diterapkan dan diperbaharui secara berkala;	1 Pedoman		52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.1.2	Implementasi rencana kesiapsiagaan dan operasi yang disesuaikan dengan jenis ancaman dan skenario spesifik untuk meningkatkan efektifitas pelayanan PMI;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.1.3	Pelayanan dasar KePALANGMERAHAN dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.1.4	Perencanaan respon yang efektif disusun berdasarkan penilaian kebutuhan dan dampak yang dilakukan secara sistematis.	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah)				
Sebaran unit-unit pelayanan yang mendukung pelokalan sumber daya dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjamin kesiapan respon				
2.2.1	Manajemen risiko terpadu berbasis kajian risiko yang komprehensif diterapkan, mencakup rencana penanggulangan bencana, kontijensi, penanganan krisis kesehatan dan adaptasi ketahanan iklim;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004

2.2.2	Implementasi kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi, merencanakan dan mengatasi kesenjangan dalam meningkatkan kesiapan respon;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota	6. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana, krisis kesehatan dan krisis iklim melalui pembentukan kelompok masyarakat terlatih, promosi dan edukasi masyarakat; 7. Penguatan pendekatan bantuan non-tunai sebagai modalitas yang mendukung efektifitas layanan kepalangmerahan; 8. Penguatan prosedur untuk meminta dan menerima dukungan regional dan internasional dalam operasi kedaruratan dan pemulihan; 9. Pengembangan perangkat asesmen kebutuhan dan perencanaan untuk kesiapan respon, kedaruratan dan pemulihan; 10. Pembaharuan database sumber daya PMI untuk kesiapan respon; 11. Pengembangan perpustakaan digital yang berisi panduan, SOP dan materi KIE; 12. Inventarisasi dan pembaharuan secara berkala alat peraga dan penunjang pelayanan dasar kedaruratan; 13. Program small grant untuk meningkatkan kapasitas PMI tingkat lokal dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat	52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.2.3	Implementasi berbagai modalitas bantuan non-tunai untuk memberikan fleksibilitas dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat terdampak;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.2.4	Kapasitas sumber daya untuk mendukung respons bencana, krisis kesehatan dan krisis iklim tersedia.	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004
2.3. Outcome (Hasil Jangka Menengah) : Kemampuan sistem layanan untuk berbagi data dan informasi menggunakan teknologi (interoperabilitas) menguat untuk mendukung terciptanya Pusat Unggulan layanan PMI				
2.3.1	Pemantauan dan pemetaan ancaman, kerentanan dan kapasitas dilakukan secara sistematis untuk mengurangi risiko bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota	52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004, 52-331-0005	
2.3.2	Fungsi pusat data dan informasi sebagai perangkat pendukung manajemen bencana atau krisis diperkuat untuk mastikan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota	52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004, 52-331-0005	
2.3.3	Sistem Manajemen Pengetahuan yang adaptive, aksesibel untuk mendorong keberlanjutan, inovasi dan berbagi pembelajaran.	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota	52-211-0001, 52-211-0002, 52-211-0003, 52-211-0004, 52-331-0005	

Tujuan Strategis-3

Membangun kesiapan organisasi untuk memastikan layanan PMI bagi korban konflik tersedia dan mudah diakses

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN KUNCI	BIAYA
Outcome (Hasil Jangka Menengah) 3.1				
Tata kelola organisasi dalam menyediakan layanan Kepalangmerahan dalam situasi konflik, yang inklusif dengan berpedoman pada Hukum Humaniter Internasional dan panduan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah				
3.1.1	Pedoman operasional layanan kepalangmerahan yang bermartabat dan inklusif tersedia, diterapkan secara konsisten dan diperbaharui secara berkala untuk menjamin kualitas layanan bagi korban konflik;	PMI Jateng dan 35 PMI Kab/Kota	1. Penguatan kerangka kerja dan prosedur agar relevan dengan respons kemanusiaan dalam situasi konflik;	
3.2.2	Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan Kepalangmerahan dalam situasi konflik diterapkan secara sistematis, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai prinsip inklusivitas;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota	2. Peningkatan kapasitas manajemen risiko dan krisis; 3. Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan keterampilan teknis;	52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
3.3.3	Kapasitas organisasi dan personil PMI diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi untuk memastikan pemahaman dan implementasi Hukum Humaniter Internasional serta Panduan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota	4. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan lainnya, masyarakat sipil dan militer untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, menghindari duplikasi upaya, serta memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif;	52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
3.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah)				
Penerimaan dan dukungan dari para pihak yang berkonflik terhadap layanan Kepalangmerahan tetap terjaga			5. Penguatan diseminasi informasi, termasuk sosialisasi HHI dan Prinsip-prinsip Gerakan kepada masyarakat luas, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan bagi korban konflik.	
3.2.1	Analisis potensi konflik dan pemetaan pemangku kepentingan dalam situasi konflik dilaksanakan secara berkala untuk memperkuat kesiapan dan repons layanan Kepalangmerahan;	PMI dengan Lembaga di Jateng		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007

3.2.2	Pendekatan komunikasi risiko diterapkan secara berkelanjutan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk memastikan dukungan terhadap layanan Kepalangmerahan sesuai prinsip netralitas dan independen;	PMI dengan Lembaga di Jateng		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
3.2.3	Dialog kemanusiaan dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan pihak-pihak terkait untuk memperkuat pemahaman bersama serta dukungan terhadap prinsip netralitas dan independen;	PMI dengan Lembaga di Jateng		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
3.2.4	Diseminasi Kepalangmerahan dilaksanakan secara komprehensif untuk menjamin aksesibilitas layanan kemanusiaan yang responsif dan tepat dalam situasi krisis;	PMI dengan Lembaga di Jateng		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
3.2.5	Advokasi layanan Kepalangerahan dilakukan secara proaktif pada masa normal, krisis dan konflik untuk membangun kolaborasi startegis dan memperluas jangkauan layanan kemanusiaan.	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007

Tujuan Strategis-4

Membangun kapabilitas sumber daya manusia yang unggul melalui pembinaan dan sertifikasi terstruktur untuk beradaptasi dengan perubahan

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
4.1. Outcome (Hasil Jangka Menengah)				
Profesionalisme dan kompetensi Sumber Daya Manusia PMI menguat dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kepalangmerahan				
4.1.1	Pedoman operasional SDM tersedia, diterapkan secara konsisten dan diperbaharui secara berkala;	Provinsi dan 35 Kab/Kota	1. Penguatan sistim kerja: prosedur penugasan, prosedur dan saluran pelaporan pelanggaran kode etik, prosedur dan perangkat penilaian kinerja, serta penerapan dan pemantauan protokol keselamatan dan keamanan; 2. Mendorong pelibatan relawan dalam proses pengambilan keputusan melalui Forum Relawan; 3. Pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan melalui pemberian kompensasi dan atau enumerasi bagi pegawai yang berprestasi dengan penghargaan formal dan promosi; 4. Pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan bagi relawan yang berprestasi dengan penghargaan formal; 5. Pengembangan kompetensi personil: selaras dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dikembangkan oleh PMI dan penguatan pada bidang tertentu (protokol keamanan dan	52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.1.2	Standar kompetensi, prosedur pembinaan dan mobilisasi relawan yang terukur dan terstandar tersedia, mengutamakan inklusivitas dan relevansi dengan dinamika sosial;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.1.3	Penguatan kapasitas SDM dalam layanan dan operasional dilaksanakan secara terarah dan berbasis kebutuhan untuk mendukung efektifitas dan kualitas kerja;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.1.4	Sistem manajemen informasi yang mendukung pelaporan dan pemantauan kinerja SDM tersedia dan dioperasikan secara efektif;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.1.5	Mekanisme pengawasan SDM dilaksanakan secara konsiten dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaa risiko;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.1.6	Sistem penilaian kinerja SDM diterapkan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan efektifitas kerja, serta engembangan manajemen diri.	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004

4.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah) Pelibatan aktif komponen PMI dalam manajemen pengembangan diri dan portofolio individu untuk mendukung penciptaan lingkungan yang aman dan inklusif			<p>keselamatan, analisis konteks, manajemen proyek, kepemimpinan, perencanaan dan pelaporan, pemantuan dan evaluasi, manajemen data dan informasi, serta diplomasi kemanusiaan);</p> <p>6. Pengembangan mekanisme surge (roster) personil untuk memastikan kesiapan dan penugasan yang efektif;</p> <p>7. Pelibatan profesional, akademisi dan tenaga ahli sebagai TSR PMI;</p> <p>8. Pembinaan PMR dilaksanakan secara konsisten, dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara berkala;</p> <p>9. Retensi pegawai dan relawan menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas organisasi. Upaya menjaga personil yang potensial melalui penghargaan yang tepat dapat meningkatkan loyalitas, sekaligus menekan angka pergantian (turnover). Dengan demikian, organisasi mampu mempertahankan sumber daya manusia berkualitas yang berperan penting dalam keberlanjutan serta pencapaian tujuan strategis.</p>	
4.2.1	Program pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi dilaksanakan secara berkala berdasarkan analisis kebutuhan;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.2.2	Penyediaan SDM yang berbasis kolaborasi aktif dengan para profesional, akademisi dan media dilaksanakan untuk menunjang layanan Kepalangmerahan;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.2.3	Pembinaan unit KSR dan PMR dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan oleh PMI Kabupaten/Kota;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.2.4	Sistem manajemen pembinaan KSR, TSR dan PMR berbasis digital diterapkan untuk mencatat portofolio dan pengembangan manajemen diri;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.2.5	Partisipasi aktif KSR, TSR dan PMR dalam program berbasis masyarakat dan layanan Kepalangmerahan diperkuat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan diri relawan.	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.3. Outcome (Hasil Jangka Menengah) Kapabilitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) meningkat sebagai Pusat Unggulan pengelolaan Sumber Daya PMI				
4.3.1	Pedoman operasional UPT diterbitkan, diterapkan dan diperbaharui secara berkala;	Provinsi dan 35 Kab/Kota	52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004	

4.3.2	Sistem pemantauan dan evaluasi diterapkan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional UPT sesuai dengan standar yang ditetapkan	Provinsi dan 35 Kab/Kota	10. Pengembangan dan optimalasi pemanfaatan teknologi dalam manajemen SDM untuk meningkatkan performa kerja maupun pengembangan SDM PMI	52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.3.3	Standar pelayanan minimal dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan memenuhi kebutuhan pengguna;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.3.4	Strategi inovatif diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan UPT;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.3.5	Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dikembangkan oleh UPT;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.3.6	Kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana diperkuat untuk mendukung pelatihan dan layanan yang optimal;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004
4.3.7	UPT dikembangkan sebagai pusat unggulan untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-261-0003, 52-261-0004

Tujuan Strategis-5

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi untuk layanan PMI yang berkelanjutan

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN KUNCI	BIAYA
Outcome (Hasil Jangka Menengah) 5.1				
Implementasi dan mekanisme pengawasan produk hukum terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku				
5.1.1	Regulasi dan pedoman operasional organisasi diterbitkan, diterapkan dan diperbaharui secara berkala;	PMI Jatengdan 35 PMI Kab/Kota	1. Penguatan kebijakan dan pengawasan hukum; 2. Pembinaan organisasi; 3. Pelembagaan pendekatan pelibatan masyarakat dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi; 4. Pengembangan mekanisme pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi;	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.1.2	Mekanisme pengawasan internal dan eksternal dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai prosedur untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko manajemen secara efektif;		5. Penguatan pelembagaan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.1.3	Mekanisme konsultasi, pembinaan berjenjang, komunikasi dan koordinasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan;		6. Pembangunan sistem penilaian kinerja organisasi yang berfokus pada hasil dan dampak.	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.1.4	Sistem manajemen informasi untuk memastikan pelaporan dan pemantauan kinerja organisasi dikembangkan dan dioperasikan secara efektif		7. Pengarusutamaan perlindungan, gender dan inklusi dalam program dan layanan PMI	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah)				
Penguatan fungsi kemarkasan untuk optimalisasi layanan kemanusiaan yang mematuhi standar akuntabilitas dan transparansi				
5.2.1	Hasil kajian pengembangan organisasi digunakan sebagai dasar upaya memperbaiki proses bisnis, meningkatkan kualitas layanan dan mendorong inovasi dalam pengelolaan organisasi;	Provinsi dan 35 Kab/Kota	8. Pengembangan transformasi digital melalui otomatisasi proses bisnis, penguatan infrastruktur TI (Teknologi Informasi), dan keamanan siber untuk menciptakan lingkungan kerja kolaboratif dan berbasis data, serta meningkatkan efisiensi, inovasi dan daya saing organisasi;	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.2.2	Sistem perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan diperkuat untuk internalisasi budaya organisasi yang berorientasi pada hasil;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003

5.2.3	Sistem dan tata kelola keuangan yang akuntabel diterapkan untuk memperkuat fungsi kemarkasan dalam mendukung program kemanusiaan;	PMI Jatengdan 35 PMI Kab/Kota	<p>9. Pengembangan strategi komunikasi terintegrasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi;</p> <p>10. Pembangunan sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung pembelajaran organisasi;</p> <p>11. Peningkatan efisiensi sistem manajemen logistik, pergudangan, kendaraan dan aset</p> <p>12. Pengembangan kerangka kerja dan atau peta jalan keberlanjutan keuangan organisasi</p>	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.2.4	Sistem logistik dan pengadaan dioptimalkan untuk mendukung efisiensi operasional kemarkasan dan akuntabilitas layanan kemanusiaan.	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
Outcome (Hasil Jangka Menengah) 5.3				
Kapabilitas organisasi menguat untuk memenuhi akuntabilitas organisasi				
5.3.1	Mekanisme umpan balik dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan diperkuat sebagai bagaian dari proses peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi;	PMI Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.3.2	Strategi manajemen pengetahuan dikembangkan dan diterapkan secara efektif;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.3.3	Prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik diterapkan di PMI semua tingkatan;	PMI Jatengdan 35 PMI Kab/Kota		52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003
5.3.4	Strategi komunikasi diterapkan untuk publikasi capaian dan kinerja organisasi kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.	PMI Provinsi dan Lembaga	52-321-0001, 52-321-0002, 52-261-0003	

Tujuan Strategis-6

Meningkatkan peran aktif PMI dalam diplomasi kemanusiaan sebagai strategi mempengaruhi kebijakan layanan kemanusiaan dan menyebarkan dampak layanan Kepalangmerahan kepada masyarakat di tingkat nasional dan global

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	BIAYA
6.1. Outcome (Hasil Jangka Menengah)				
Strategi diplomasi kemanusiaan dilaksanakan sebagai upaya advokasi kebijakan untuk layanan Kepalangmerahan yang inklusif dan berkelanjutan				
6.1.1	Kapasitas organisasi dan personil PMI dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan ditingkatkan secara optimal;	Provinsi dan 35 Kab/Kota	1. Penguatan koordinasi antar semua komponen Gerakan untuk memastikan respons yang lebih cepat, terkoordinasi dan efisien terhadap berbagai krisis kemanusiaan; 2. Pemetaan peran dan tanggung jawab antar semua komponen Gerakan untuk memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang dilakukan dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif; 3. Penyusunan strategi diplomasi kemanusiaan berdasarkan skala waktu dan cakupan untuk memastikan keberlanjutan; 4. Peningkatan kapasitas internal di bidang diplomasi kemanusiaan; 5. Pengarusutamaan perspektif kemanusiaan yang inklusif untuk memastikan bahwa pendekatan PMI tetap relevan dengan dinamika dan tantangan lokal maupun	52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
6.1.2	Kontribusi aktif PMI dalam kebijakan nasional dan global diperkuat untuk mendukung penyediaan akses kemanusiaan yang efektif bagi masyarakat yang membutuhkan;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
6.1.3	Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan diplomasi kemanusiaan;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
6.1.4	Analisis kebutuhan diplomasi kemanusiaan PMI dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perubahan dan dinamika konteks nasional dan global yang terus berkembang.	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
6.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah)				
Optimalisasi publikasi dan edukasi tentang peran dan kontribusi PMI dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan				
6.2.1	Kegiatan kemanusiaan PMI yang bermartabat disajikan dalam laporan yang transparan dan akuntabel, menjadi dasar penting bagi upaya diplomasi kemanusiaan;	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007

6.2.2	Layanan kemanusiaan PMI secara terpadu mengadopsi pendekatan nasional dan global yang selaras dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, memastikan respons yang relevan, inklusif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan;	Provinsi dan 35 Kab/Kota	6. global; Penguatan partisipasi aktif PMI dalam forum dialog lintas sektor dan lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun global, untuk mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan.	52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007
6.2.3	Media advokasi dan sarana-prasarana untuk mendukung diplomasi kemanusiaan tersedia secara memadai, memastikan efektivitas dalam menyampaikan pesan, membangun kolaborasi, dan memperkuat pengaruh kemanusiaan.	Provinsi dan 35 Kab/Kota		52-251-0001, 52-251-0002, 52-251-0003, 52-251-0007

Tujuan Strategis-7

Meningkatkan peran aktif PMI dalam mewujudkan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan diversifikasi sumber daya, dan memberikan layanan kemanusiaan yang inovatif dan adaptif.

NO	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN KUNCI	BIAYA
7.1. Outcome (Hasil Jangka Menengah) Peran aktif PMI meningkat dalam kemitraan strategis yang dinamis, terarah dan terukur				
7.1.1	Sistem manajemen kemitraan yang efektif dan efisien diterapkan, memungkinkan PMI untuk menjalin kemitraan strategis yang lebih luas dan berkualitas;	35 PMI Kab/Kota dan 15 Mitra External	1. Pemetaan terhadap individu atau organisasi yang memiliki potensi menjadi mitra startegis PMI, berdasarkan kesamaan visi, misi dan tujuan; 2. Pengembangan database mitra yang berisi profil lengkap, sejarah kerjasama, area kerjasama dan narahubung;	52-221-0001, 52-221-0002, 52-321-0001, 52-261-0003, 52-251-0003
7.1.2	Kemitraan strategis yang terjalin sejalan dengan prioritas strategis dan kebutuhan sumber daya PMI;	35 PMI Kab/Kota	3. Pengembangan portal informasi terkait program, laporan dan sumber daya yang relevan;	52-221-0001, 52-221-0002, 52-321-0001, 52-261-0003, 52-251-0003
7.1.3	Publikasi laporan kemitraan yang menyajikan hasil dan dampak yang telah dicapai serta kontribusi kemitraan terhadap tujuan strategis PMI diterbitkan secara berkala;	35 PMI Kab/Kota	4. Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kemitraan; 5. Program pengembangan kapasitas manajemen kemitraan;	52-221-0001, 52-221-0002, 52-321-0001, 52-261-0003, 52-251-0003
7.1.4	Program penghargaan bagi mitra diterapkan secara berkala untuk memperkuat loyalitas mitra terhadap PMI;	5 Mitra External	6. Penerbitan laporan kemitraan secara berkala; 7. Pembuatan kerangak kerja berbasis hasil dan atau pedoman yang adaptif dalam mendukung	52-221-0001, 52-221-0002, 52-321-0001, 52-261-0003, 52-251-0003

7.1.5	Kapasitas kolaboratif organisasi diperkuat melalui pertukaran pengetahuan bersama mitra.	35 PMI Kab/Kota dan 15 Mitra External	implementasi kemitraan strategis; 8. Program penguatan branding dan reputasi dalam kemitraan; 9. Penguatan hubungan dan koordinasi internal PMI; 10. Pengembangan kompetensi PMI dalam mobilisasi sumber daya; 11. Pemanfaatan hasil pembelajaran untuk perbaikan strategi implementasi mobilisasi sumber daya di masa mendatang.	52-221-0001, 52-221-0002, 52-321-0001, 52-261-0003, 52-251-0003
7.2. Outcome (Hasil Jangka Menengah) Kapasitas manajemen kemitraan meningkat untuk mendukung terciptanya diversifikasi keahlian (sumber daya) dan pendanaan				
7.2.1	Program pengembangan soft skills dan hard skills manajemen kemitraan bagi personil PMI diselenggarakan secara berkala;	35 PMI Kab/Kota		52-261-0001, 52-261-0002, 52-281-0001, 52-281-0002
7.2.2	Platform digital manajemen data kemitraan yang terintegrasi dikembangkan untuk memperkuat dokumentasi kontribusi dan dampak kemitraan.	1 PMI Jateng		52-261-0001, 52-261-0002, 52-281-0001, 52-281-0002